PERAN KPU SURABAYA DALAM MENARIK MINAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PILWALI SURABAYA 2015

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

Muhammad Said Ode

NIM: E34212051

PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Muhammad Said Ode

NIM : E34212051

Prodi : Filsafat Politik Islam

Judul : **PERAN KPU SURABAYA DALAM MENARIK MINAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PILWALI SURABAYA 2015**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 28 Januari 2019

Pembimbing,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si

NIP: 198202102009011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Muhammad Said Ode* ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 06 Januari 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan

Dr. Kunawi, M.Ag

NIP : 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua

M. Anas Fakhruddin, M.Si

NIP : 198202102009011007

Sekretaris

Laili Bariroh, M.Si

NIP : 197711032009122002

Penguji I

Dra. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP : 196909071994032001

Penguji II

M. Fathoni Hakim, M.Si

NIP : 198401052011011008

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muhammad Said Ode

NIM : E34212051

Prodi : Filsafat Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : **PERAN KPU SURABAYA DALAM MENARIK MINAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PILWALI SURABAYA 2015**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hail karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar sarjana yang saya peroleh.

Surabaya, 28 Januari 2019

yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
40714AFF946148423
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Said Ode

E34212051

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Said ode
NIM : E3421051
Fakultas/Jurusan : ushuluddin / Pemikiran politik islam.
E-mail address : muhammadsaidg41@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERAN KPU SURABAYA DALAM MENARIK MINAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PILWALI SURABAYA 2015

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. SAID ODE)
nama terang dan tanda tangan

Nama : Muhammad Said Ode

NIM : E34212051

Judul : **PERAN KPU SURABAYA DALAM MENARIK MINAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PILWALI SURABAYA 2015**

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam ranah lokal KPUD adalah ujung tombak berjalannya roda kontestasi politik dan demokratisasi di tingkat lokal. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran dan strategi KPUD Surabaya selaku lembaga penopang jalannya demokratisasi di ranah lokal seperti Surabaya. Tepatnya penelitian ini mengkaji bagaimana peran dari KPUD Surabaya dalam menarik minat pemilih pemula pada Pilwali Surabaya 2015 dan Bagaimana strategi KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015.

Kata kunci : KPUD Surabaya, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

ABSTRAK ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN ORISINALITAS v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Penelitian Terdahulu 7

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KAJIAN TEORI 22

A. Partisipasi Pemilih Pemula 22

B. Pemilih Pemula 27

C. Pemilu Dan Demokrasi 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Teori Efektivitas..... 31

E. Pendekatan Istitusional Sebagai Pisau Analisis.....34

BAB III SETTING PENELITIAN..... 37

A. Gambaran Umum Kota Surabaya 37

B. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)..... 40

C. Konsep Komisi Pemilihan Umum 45

D. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya 50

E. Pemilih Pemula Di Pemilukada atau Pilwali Surabaya..... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN 52

A. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 52

B. Partisipasi Pemilih Pemula..... 54

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Pilwali 2015 Kota Surabaya..... 57

D. Pilwali Surabaya 2015 Dan Peran KPU Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula..... 61

E. KPUD Surabaya Dan Strategi Melakukan Sosialisasi Ke Sekolah Dan Kampus-Kampus Untuk Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Di Pilwali Surabaya 2015..... 62

F. KPUD Surabaya Dan Efektivitas Peran Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula..... 71

G. KPUD Surabaya Dan Pentingnya Peran Institusi..... 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP..... 75

A. Simpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu langkah untuk memenuhi persyaratan minimal bagi tegaknya tatanan demokrasi di negeri ini.[1] Sebagaimana menurut Bingham Powell Jr. Sebagaimana dikutip oleh M. Rusli Karim dalam bukunya yang berjudul Pemilu Demokratis Kompetitif ada beberapa indikator kehidupan politik sebuah negara demokrasi yaitu :

1. Legitimasi Pemerintahan didasarkan pada klaim pemerintah mewakili rakyat
2. Pengaturan bagi yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilu yang kompetitif
3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun yang dipilih untuk menduduki jabatan penting
4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa paksaan dari orang lain
5. Masyarakat dan pemimipin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers.[2]

[1] M.Rusli Karim. *Pemilu Demokratis Kompretitif,* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991), hlm xi
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya dari penjelasan tersebut dengan jelas bahwa adanya pemilu merupakan sebuah syarat mutlak sekaligus indikator utama sebuah negara dapat dikatakan demokratis. Dalam konteks Indonesia sendiri pemilu pertama kali dilakukan tahun 1955, yang disebut sebagai pemilu paling demokratis hingga saat ini. Perolehan suara di empat besar pemilu 1955 menjadi bukti betapa demokratisnya pemilu pada saat itu, dengan di isi oleh empat (4) partai dengan ideologi yang berbeda. PNI yang nasionalis, Masyumi dsn NU yang islamis, serta PKI yang sosialis komunis. Kemudian setelah suekarno tumbang, dan orde baru mulai berkuasa, pemilu di gelar kembali pada tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997. Perlehatan pemilu di era orde baru bisa dikatakan jauh dari kata demokratis dengan di isi oleh tiga (3) kontestan saja yaitu Golkar, PPP, dan PDIP dengan Golongan Karya selalu menjadi pemenang. Baru kemudian ketika tuntutan reformasi yang berjuang pada tumbangnya orde baru dan liberalisasi politik. Pemilu di Indonesia kembali menemukan semangat demokrasinya. Dengan menjamurnya kontestan pemilu di tahun 1999 dengan 48 partai politik, di tahun 2004 dengan 24 partai politik, tahun 2009 dengan 44 partai politik, dan 2014 dengan 10 partai politik.[3]

Salah satu persoalan klasik yang menghinggapi pesta demokrasi di aras lokal sampai hari ini adalah tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi di daerahnya. Angka golput dalam pesta demokrasi yang hadir di aras lokal begitu tinggi, atau bahkan menurut Komisioner

[3] Muhadam Labolo & Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia:Teori konsep dan isu strategi,* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KPU Surabaya Nur Syamsi. Angka golput justru trennya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti pada pilwali Surabaya tahun 2010.[4]

Data Pemilih Pilwali Surabaya 2010

Daftar Pemilih Tetap (DPT)	**2.145.263 Suara**
Yang Menggunakan Hak Pilih	**1.026.405 Suara**
Jumlah Pemilih Pemula	**882.781 Suara**
Angka Golput	**11.721 Suara**

Dari jumlah 2.145.263 DPT tahun 2010 yang ada di Surabaya angka partisipasi hanya sebesar 46%. Dari jumlah tersebut, terdapat pemilih pemula sebesar 8,6 %.[5]

Data Pemilih Pilwali Surabaya 2015

Daftar Pemilih Tetap (DPT)	**2.034.315 Suara**
Yang Menggunakan Hak Pilih	**1.052.041 Suara**
Jumlah Pemilih Pemula	**14.623 Suara**
Angka Golput	**48% Suara**

[4] https://kpu-surabayakota.go.id/informasi-publik/ diakses 1 oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pada pilwali Surabaya tahun 2015 lalu angka golput mengalami sedikit penurunan dari total 2,034,315 DPT yang ada, jumlah partisipasi warga Surabaya mencapai 1.052.041 atau sekitar 52% dengan angka golput 48%. ini menandakan bahwa tingkat partisipasi pemilih di tahun 2015 mengalami peningkatan dari pada tahun-tahun sebelumnya seperti yang dijelaskan di atas, ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan KPU Surabaya dalam menarik minat masyarakat dan pemilih pemula agar berpartisipasi dan menyalurkan hak pilihnya melalui program-program atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya.[6]

Menariknya disini dari 2.034.315 DPT daftar pemilih tetap pilwali Surabaya tahun 2015 lalu, ada 28.721 DPT atau sekitar 1,39 % yang berstatus sebagai pemilih pemula.[7] Mereka adalah anak-anak muda warga Surabaya yang berusia 17-21 tahun dan baru pertama kali menerima hak untuk memberikan suara. Dari data ini penulis kemudian bertanya bagaimana Peran KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di pilwali Surabaya 2015 lalu.

Upaya yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu Kota Surabaya dalam menarik minat pemilih pemula yang notabene masih muda maka upaya yang digunakanpun. Seperti, lembaga pemilihan umum Kota Surabaya berusaha menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum. Dengan melalui pendidikan politik kepada

[6] https://kpu-surabayakota.go.id/informasi-publik/ diakses 1 oktober 2017
[7] KPU.go.id diakses 2 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan Pilwali Kota Surabaya Tahun 2015, Tingkat partisipasi pemilih pemula masih cukup rendah dibanding pilwali 2010 lalu. Meskipun demikian sebenarnya KPU telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk menarik minat partisipasi pemilih pemula, namun rendahnya partispasi pemilih pemula bukan tanggung jawab KPU semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah dan peserta pemilu itu sendiri. Banyak strategi yang dilakukan oleh pihak KPU dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula dalam melakukan pemilihan kepala daerah di daerahnya. Seperti yang di sebutkan di atas. KPU Surabaya juga telah mendirikan Rumah Pintar Pemilu pada tahun 2015 lalu dan masih ada sampai saat ini. Rumah pintar pemilu ini di bentuk untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, pemilih pemula dan kalangan pelajar untuk belajar bagaimana sejarah terbentuknya KPU, tata cara pemungutan suara, dan informasi seputar kepemiluan. Di rumah pintar ini terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi oleh kelompok maupun perseorangan. Penyediaan fasilitas pembelajaran kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan. Berdasarkan hal itu KPU sebagai penyelenggara pemilu mulai mengambil fokus untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dalam memastikan bahwa pemilih dalam hal ini masyarakat dan para pemilih pemula memperoleh informasi yang memadai terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu,selain itu tujuannya agar membangun pengetahuan politik dan kesadaran politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat Pemilu juga merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemililu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015?
2. Bagaimana strategi KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015?

C. Batasan Masalah

Penulis berupaya mengkaji bagaimana peran dan strategi KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015. Serta sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pilwali kota Surabaya tahun 2015 lalu, dan apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik mereka dalam pilwali kota Surabaya tahun 2015 lalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak didapat dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui peran KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi KPU Surabaya dalam menarik minat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pilwali kota Surabaya tahun 2015

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di dapat dari penelitian ini adalah

1. Sebagai bentuk kajian akademis tentang praktek pesta demokrasi di ranah lokal dalam hal ini pilwali kota Surabaya
2. Sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana pandangan warga Surabaya tentang Pemilukada di daerahnya sendiri

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang penulis dapatkan berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang membahas partisipasi pemilih pemula

a. Skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal" oleh Wahyu Rahma Dani. Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2010. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana peran dan bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam pemilu 2009.[8]

b. Skripsi dengan judul "Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang 2013" oleh Indar Melani Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hassanudin Makasar 2014. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana perilaku politik pemilih pemula di kecamatan Duampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang 2013.[9]

c. Skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pilbup Banyumas 2013 di Desa Kambaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas" oleh Lisa Retnasari. Mahasiswi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana peran dan bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Kembaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dalam Pilbup 2013.[10]

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Fokus Penelitian

---

[8] Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal* (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,2010), viii

[9] Indar Melani, *Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang 2013* (skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hassanudin Makasar 2014), viii.

[10] Lisa Retnasari, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pilbup Banyumas 2013 di Desa Kambaran Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas* (Skripsi tidak diterbitkan, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013), v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.[11] Adapun bentuk penelitiannya yaitu deskriptif yang mana penelitian yang dilakukan hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam situasi tertentu.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dan empiris dalam penelitian sangat diperlukan. Oleh karena itu sesuai dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskroptif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[12]

Alasan Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu : Pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan. Kedua, lebih muda menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.[13]

---

[11] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bnadung:Remaja Rosdakarya, 2005), 4
[12] Ibid hal : 5
[13] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2006), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadiansecara sistematis dan akurat.[14] Jadi, melalui penelitian deskriptif ini agar penelitian mampu mendeskripsikan tentang peran KPU Surabaya dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pilwali Surabaya 2015.

c) Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa fokus yang harus di tentukan untuk menghindari peneliti dari pengumpulan data yang tidak perlu maka penelitian ini perlu kiranya ada fokus yang sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya. Fokus penelitian ini memiliki dua fokus yaitu:

a. Penetapan fokus untuk membatasi study, yang berarti dengan adanya fokus penentuan tempat penilaian menjadi lebih layak
b. Penetapan fokus secara efektif atau terpisah dari yang lain untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Mungkin ada suatu data yang menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak perlu dimasukan

Oleh sebab itu penetapan fokus penelitian ini juga tidak terlepas dari membatasi diri dari sekelompok orang yang terkait bahkan

[14] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2002),309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pelaku dalam kasus terkait. Pendalaman tahapan alasan-alasan mengapa berperilaku atau bertindak, berfikir, berpendapat dan memberi manfaat bagi peneliti.

Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang hanya sebagai informasi, walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukan ke dalam beberapa data yang sedang dikumpulkan. Berdasarkan latar belakang, dari masalah dan tujuan peneliti, maka fokus penelitian ini adalah[15]:

a. Peran KPU Surabaya dalam Menarik Minat Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Pilwali Surabaya
b. Faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi politik pemilih pemula di Pilwali Surabaya

2. Sumber Data

Data merupakan hal yang esensi untuk menguatkan suatu permasalahan dan juga diperlukan untuk menjawab masalah peneliti. Peneliti memperoleh data yang ada kaitannya dengan Peran KPU Surabaya dalam menarik minat partisipasi politik pemilih pemula di Pilwali Surabaya dan sumber data tersebut diperoleh dari :

1. Data Primer yaitu data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan

[15] Ibid hal: 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian.[16] Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Dari sekian banyak pemilih pemula yang ada Penulis mengambil Informan yang lebih tau atau setidaknya bisa memberikan informasi terkait apa yang penulis butuhkan seperti anggota Osis atau yang terlibat dengan program atau sosialisasi dari KPU Surabaya antara lain :

a. Hilman Hazmi kelahiran Surabaya 1995 mahasiswa UNESA Surabaya (Umur 21 tahun pada 2015)
b. Achmad Hari Pitriono kelahiran surabaya 1996 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STESIA Surabaya (Umur 20 pada tahun 2015).
c. Ahmad Zaenuri Kelahiran Surabaya 1995 Mahasiswa UIN Surabaya (Umur 21 tahun pada 2015)
d. Adam Muhammad kelahiran Surabaya 1997 Mahasiswa UNAIR (Umur 20 pada tahun 2015)
e. Sulinda Diyah Kelahiran Surabaya 1995, Mahasiswi Untag Surabaya (Umur 21 pada tahun 2015)
f. Ketua KPU Surabaya Bapak Nur Syamsi
g. Bu Iswati Selaku staf bagian Data dan Informasi

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005) hal : 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data Skunder yaitu beberapa data yang diperoleh selama melaksanakan studi kepustakaan berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dan arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian tentang pilkada dan pemilih pemula.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling.* Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dari jenis penelitian yang lain. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.[17]

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling.*

[17] Ibid hal : 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sempel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[18] Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Atau dengan kata lain pengambilan sempel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti. Informan yang penulis tuju sebagai berikut :

a. Pemuda Surabaya berusia 17-21 tahun di tahun 2015 yang berstatus sebagai pemilih pemula di Pilwali Surabaya 2015.
b. Ketua dan Staf KPU Surabaya

4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari lapangan penelitian. Data merupakan bahan spesifik dalam melakukan analisis.[19] Untuk mendapatkan data yang valid dan aktual, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, observasi atau pengamatan meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan,

[18] Ibid hal : 298
[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga, 2001), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kusioner, rekaman gambar dan rekaman suara.[20]

Terkait dengan pokok permasalahan, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

a. Partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015
b. Peran KPU Surabaya dalam menarik minat partisipasi politik pemilih pemula

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawan dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang sedang diteliti. Sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, bahwa wawancara harus dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[21] Jenis data yang digali dalam metode ini meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informan yang terdapat di kota Surabaya.

Informan yang penulis tuju sebagai berikut :

a. Pemuda Surabaya berusia 17-21 tahun di tahun 2015 yang berstatus sebagai pemilih pemula di Pilwali Surabaya 2015. Penulis mengambil Informan yang terlibat dengan program atau sosialisasi dari KPU Surabaya.
b. Ketua dan Staf KPU Surabaya

3. Metode Dokumentasi

[20] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2002),156-157
[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983),131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menyelidiki bagan, struktur organisasi, grafik, arsip-arsip, foto dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.[22] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, ringkas dan sederhana tentang peran KPU Surabaya dalam menarik minat partisipasi politik pemilih pemula di

[22] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilwali 2015, sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merupakan analisis data yang menggolongkan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat di tarik kesimpulan (*verifikasi*). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis detiap selesai mengumpulkan data. laporan-laporan itu perlu di direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. penyajian data yaitu mengumpulan data atau informasi secara tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat, grafik, dan *chart.*[23] Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

[23] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Verifikasi (*verification*)

Verivikasi merupakan rangkaian analisis data pucak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

6. Keabsahan Data

Dalam penelitian, setiap hal temuan harus di cek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan : Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang pernah maupun baru ditemui. Melalui perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka dan saling mempercayai. Dengan demikian tidak ada informan yang disembunyikan lagi.[24]
2. Meningkatkan Ketekunan : meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan bersinambungan. Dengan cara

[24] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kualitati dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 270-271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi : Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang di dasari pola pikir fenomologis yang bersifat multi perspektif. Pola pikir fenomologis yang besifat multi perspektif.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis logika komparatif abstraktif yaitu suatu logika yang menggunakan cara perbandingan. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.[25]

Analisis penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya di sepanjang melakukan penelitian. Jadi semenjak memperoleh data dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Selanjutnya alur analisis data yang penulis gunakan adalah:

[25] Burhan Boengin, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga,2001), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Reduksi data yaitu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif disejajarkan maknanya dengan pengelola data.
2. Penyajian data yaitu suatu cara merangkum data yang memudahkan untuk menyimpulkan hasil penelitian.
3. Menarik kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data.

Dengan demikian pekerjaan mengupulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menulis, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan data, serta menarik kesimpulan dengan cara membandingkan sebagai analisis data kualitatif.[26]

Dalam penelitian kualitatif umumnya lebih melihat proses dari pada produk dari obyek penelitiannya. Selain itu nantinya kesimpulan dari data kualitatif tidak berupa angka-angka tetapi disajikan dalam bentuk kata verbal yang pengelolahannya mulai dari mengedit sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dikerjakan di lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,yang berisikan alasan atau permasalahan yang mendasari penulisan skripsi, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta,2008), 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisikan tentang kajian teoritik yang berkaitan Demokrasi, pemilu, dan tentu saja partisipasi politik pemilih pemula.

Bab ketiga, Setting penelitian yaitu meliputi Profil Kota Surabaya, Dan konsep pemilihan umum,

Bab keempat merupakan Analisis data yaitu tahap dimana peneliti mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Bab ini juga mencakup tentang temuan penelitian dan konfirmasi temuan dengan teori.

Bab kelima Merupakan bagian penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Pemilih Pemula

1) Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.[27]

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Berikut beberapa definisi partisipasi politik dari beberapa sumber:

a) Menurut Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

[27] Samuel P. Hutington dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*.Rineka Cipta.Jakarta.1994. hal.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.[28]

b) Menurut Herbert Mc Closky dikutip dari Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.[29]

c) Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[30]

2) Jenis-jenis Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :[31]

a) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.

b) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

---

[28] Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik*.Gramedia.Jakarta.1982. hal.14
[29] Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*.Gramedia.Jakarta.2008. hal.183-184
[30] Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*.Gramedia.Jakarta.2008. hal.140
[31] Rahman H.I. *Sistem Politik Indonesia*.Graha Ilmu.Yogyakarta.2007. hal.288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Golongan putih (golput) atau kelompok apatis**, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis, yaitu:[32]

a) **Partisipasi politik apatis**, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
b) **Partisipasi politik spector**, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
c) **Partisipasi politik gladiator**, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
d) **Partisipasi politik pengritik**, orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

3) **Bentuk Partisipasi Politik**

Menurut Mas'oed dan MacAndrews partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:[33]

a) **Electroral activity**, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk

[32] Cholisin. *Dasar-dasar Ilmu Politik*.UNY Press.Yogyakarta.2007. hal.152
[33] Mochtar Mas'oed dan Mc Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*.Gajah Mada University Press.Yogyakarta.2000. hal.225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.

b) **Lobbying**, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.

c) **Organizational activity**, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.

d) **Contacting**, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.

e) **Violance**, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

Sedangkan Dalton (2009) mengelompokkan bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) **Voting**. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (voting/electing). Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.

b) **Campaign activity**. Yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.

c) **Communal Activity**. Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (*out side electoral setting*). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.

d) **Contacting personal on personal matters**. Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap seseorang terkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. Diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, ataupun membangun jaringan.

e) **Protest**. Yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang unconventional seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

B. Pemilih Pemula

1. Pengertian Pemilih Pemula

Pemilih pemula di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih.

Menurut pasal 1 ayat 22 UU No. 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggaraan pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.[34]

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih

[34] UU No 10 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada) selama ini adalah objek dalam kegiatan politik. Yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

a. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
b. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
c. Mempunyai hak memilih dalam kontestasi demokrasi (Pileg, Pilpres, Pilkada).

C. Pemilu dan Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.[35]

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipenggang oleh rakyat. Jadi demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikuti sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.[36]

---

[35] http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
[36] Abdul aziz hakim. *Negara hukum dan demokrasi diindonesia*.pustaka pelajar.yogjakarta.2011. hal.174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Menurut Robert Dahl, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sikulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

D. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasilguna atau menunjang tujuan. Efektivitas didefinisikan oleh para pakar dengan berbeda beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan criteria efektivitas organisasi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:

"Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut".[37]

Gibson memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu pertama seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan kedua hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :[38]

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi

[37]Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000),29
[38]Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989),129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.[39]

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indicator special misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.[40]

---

[39]Ibid

[40]Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung:1989),48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pendekatan Istitusional sebagai Pisau Analisis

Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis. Pendeketan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama, bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya, dan bagaimana institusi itu berinteraksi.

Negara sebagai pusat kekuasaan (*state power centre)* merupakan inti dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

- ✓ Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum.
- ✓ Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
- ✓ Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ✓ Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.
- ✓ Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.

Pendekatan institusionalisme dibagi menjadi dua yaitu institusionalisme tradisional atau lama, dan institusionalisme baru. Perbedaan antara keduanya adalah jika institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan (aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Sedangkan institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang perlu ada rencana atau design yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan tertentu. Perhatian Institusionalisme baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal moneter, pasar dan globalisasi ketimbang masalah konstitusi yuridis.

Institusionalisme dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan public di nomor duakan.[41]

Kesimpulannya bahwa institusionalisme baru dapat di anggap sebagai suatu pendekatan yang luas, beraneka warna terhadap politik, yang disatukan

[41] John T. Ishiyama. *Teori Politik*.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2008. hal.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penegasan bahwa institusi adalah variable yang menjelaskan sebagian besar kehidupan poltik. Kekuatan institusionalisme baru dapat ditemukan dalam karakter multi teoretisnya yang memungkinkan penilaian tentang dalil-dalil yang bersaing dari berbagai teori politik. Konstribusi pendekatan institusionalisme baru dalam ilmu poltik dilihat dari keuntungan epistimetik dimana perpindahan suatu dari posisi yang problematis menuju yang lebih memadai dalam suatu bidang alternative yang tersedia, dan dapat dibedakan dibedakan dengan perpindahan epistemology mitos dari kesalahan menuju kebenaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolitan ± 3.121.276 Jiwa. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga).[42] Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur. Surabaya terkenal dangan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Kota Surabaya berasal dari cerita mitos pertempuran antara suro (ikan hiu) dan boyo (buaya) dan akhirnya menjadi kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai Ibukota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan

[42] Pemerintah kota Surabaya, *Profil Surabaya*, pdf 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suramadu.

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak Terletak antara 07 21 lintang selatan dan 112 36 s.d 112 54 bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di daerah selatan ketinggian 25 sampai 50 meter diatas permukaan air laut. Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing.

Wilayah Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2010 sebanyak 2.938.225 jiwa dengan komposisi 50,20% laki-laki dan 40,80 perempuan. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada tahun 2011 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 35-40 tahun (283.365 jiwa) dan 25-30 tahun (279.668 jiwa). Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi kordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat "Menuju Surabaya lebih baik" adalah sebuah amanah. Sampai hari ini Kota Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tantangan zaman. “Menuju Surabaya Lebih Baik” identik dengan upaya untuk menjawabnya, “Surabaya sebagai kota cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan”.[43]

Peningkatan kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan persoalan yang dihadapi Kota Surabaya, oleh karenanya pembangunan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia warga Kota Surabaya, tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas intelektual, melainkan juga mencakup kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan sendirinya peningkatan taraf kesehatan juga tidak hanya menitikberatkan pada kesehatan jasmani semata, namun juga meliputi kesehatan mental dan rohani warga kota, selain itu dalam proses pembangunan harus mampu menghadirkan suasana kota yang manusiawi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta aparatur Pemerintah Kota Surabaya secara komprehensif dan terintegrasi, berbasis optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota serta didukung oleh pengembangan infrastruktur kota. Membangun kehidupan kota yang lebih Bermartabat untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tolok ukur utama. Selain itu dalam pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada infrastruktur fisik sebagai penyediaan sarana dan prasarana dasar warga kota semata, namun juga meliputi infrastruktur sosial demi

[43] www. wordpress.com, gambaran umum kota surabaya, di akses tanggal 10 Oktober 2019
jam 18.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan lingkungan hunian berfasilitas kontemporer dengan suasana khas sesuai tradisi dan budaya lokal.

B. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Secara umum undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “money politic” yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

Timbulnya kelemahan-kelemahan tersebut, untuk memperbaikinya maka diberlakukanlah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyrakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang telah diganti menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2011, dampak atas puusan MK No.072-073/PUU-II/2004,44 pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi rezim pemerintahan daerah, tetapi telah menjadi bagian dari rezim pemilu. Di dalam UU No.22 Tahun 2007 istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemudian diubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah(Pemilukada), sebagaimana yang disebutakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4: Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara angsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[44] Lihat, Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 Pembatalan ketentuan pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "...yang bertanggungjawab kepada DPRD", Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD", pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD", pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis, ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi menjadi rezim Pemilu dengan sebutan Pemilukada:[45]

Pertama, adanya putusan MK No. 072-073/ PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang dimohonkan oleh Cetro dkk pada tahun 2004. Dalam amar putusannya, MK membatalkan ketentutan Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat "yang bertanggung jawab kepada DPRD", Pasal 66 ayat (3) huruf e "meminta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas KPU", pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "kepada DPRD", pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "oleh DPRD" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait penyelenggara Pemilu dalam UU No.32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.46 Ketiga, peralihan kewenangan penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.[47]

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan

---

[45] Arif Wibowo, Menata Sistem Pemilukada secara serentak secara Nasional, Evaluasi Pemilukada 2010, Baleg PDI Perjuangan.
[46] Lihat , pasal 132 UU 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu
[47] Lihat, pasal 236C UU no. 12 Tahun 2008 perubahan kedua UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilukada langsung tercermin dalam penyelengaraan Pemilukada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik.[48]

Pelaksanaan Pemilukada Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Winarno mengatakan bahwa: "sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih". [49]

Dengan demikian adanya Pemilukada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya. Dilaksanakannya Pemilukada secara langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Agung Djokosukarto, ada 5 dimensi dan tujuan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu:

---

[48] Prihatmoko, Joko J. 2005, *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2

[49] Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengapresiasikan HAM dalam bidang politik
2. Mewujudkan prinsip demokrasi partisipatif (asas partisipasi universal)
3. Mewujudkan tatanan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah.
4. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat madani yang egalite
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan derah sesuai dengan prinsip good governance, serta memperkuat kemandirian daerah dan berotonomi

Pemilukada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal; Mengorganisir masyarakat kedalam suatu aktivitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi; dan Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Selain itu, hal yang terpenting dari Pemilukada ini adalah sebuah sarana demokratisasi di tingkat lokal yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan calon yang terpilih akan kuat legitimasinya karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga tercipta stabilitas politik dalampemerintahan daerah.

C. Konsep Komisi Pemilihan Umum

1. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Secara ringkas mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam satu undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat 3 Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya

KPU adalah lembaga politik yang diatur oleh UUD 1945. Hal ini tentu wajar sebab Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi yang menghendaki adanya Pemilihan Umum (pemilu). Adanya Pemilu berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Dalam hal ini, KPUD menempati posisi, secara struktural, di bawah KPU Republik Indonesia. Tentu dengan tugas kewenangan yang berbeda.

Jika dilacak, pijakan penyelenggaraan Pemilu ada pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas hal ini, secara teknis penyelenggaraan Pemilu kemudian diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum[50].

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2007 pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Sementara dalam ayat (6) di pasal yang sama disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Maka melalui hal ini, menjadi jelas pijakan secara

[50]Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_15.pdf (Diakses pada 12 oktober 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional adanya lembaga KPU. Terkait KPUD, di ayat (8) pasal yang sama disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

E. Pemilih Pemula di Pemilukada / Pilwali Surabaya

Pemilih pemula di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia memilih.

Menurut pasal 1 ayat 22 UU No. 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggaraan pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.[51]

Dalam konteks Pilwali Surabaya 2015 lalu dari 2.142.900 daftar pemilih tetap pilwali Surabaya tahun 2015, ada 28.721 DPT atau sekitar 1,39 persen yang berstatus sebagai pemilih pemula.[52] Mereka ini adalah anak-anak muda warga Surabaya yang berusia 17-21 tahun dan baru pertama kali menerima hak untuk memberikan suara dalam pesta demokrasi di aras lokal Surabaya.

[51] UU No 10 Tahun 2008
[52] KPU.go.id diakses 2 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing- masing oleh undang-undang. KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota.

Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu misalnya dalam hal penetapan hasil Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi KPU.

Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang sudah didepan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

1. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan.
2. mengoordinasikan dan memantau tahapa.
3. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu.
4. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Partisipasi Pemilih Pemula

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik yang bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung dalam memilih pimpinan maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.[53] Milbrath dan Goel sebagaimana dikutip dari Ramlan Surbakti membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori berikut : *Pertama*, apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. *Keempat*, pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi tidak konvensional.[54]

Partisipasi politik dapat bersifat perorangan (individual) misalnya melakukan kritik dan memberi masukan terhadap kebijakan publik baik dilakukan dengan cara menulis di media ataupun dilakukan secara langsung menyampaikan kritik dan saran kepada pengambil kebijakan. Selain itu, partisipasi politik bersifat kelompok terorganisir (LSM, Parpol, ormas,

---

[53] Ramalan Surbakti.. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Raja Grasindo, 1999). Hal.135

[54] Ibid 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan). Misalnya, kita terbiasa melihat aksi organisasi mahasiswa atau kelompok masyarakat yang melakukan unjuk rasa menyuarakan berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Di dalam konteks pemilu partisipasi politik dapat di bedakan menjadi dua katagori yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif/substantif. Pertama, partisipasi pasif adalah kegiatan memilih oleh partisan karena dimobilisir oleh individu atau kelompok tertentu dalam rangka meraih suara partisan. Kedua, partisipasi aktif/substantif adalah kegiatan memilih partisan yang didasari karena kesadaran bahwa pilihannya akan mampu menyalurkan aspirasi partisan. Keduanya sama-sama dalam kerangka partisipasi politis kelompok atau individu, Tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang sangat kuat pada tataran prinsip dari pada realitas. Bahkan, tidak jarang partisan aktif turut serta dalam proses pengawasan suara dengan cara yang memungkinkan dilakukan.

Melirik realitas yang terjadi, pemilih dalam menggunakan hak pilihnya bisa dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. *Pertama,* karena kesamaan latar belakang agama, pada beberapa kelompok pemilih kesamaan agama antara si pemilih dengan orang yang akan dipilih menjadi dasar pertimbangan khusus karena merasa punya kebanggaan atau kesamaan persepsi dan doktrin tentang syarat pemimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Kedua,* karena kesamaan latar belakang asal daerah, pemilih kadang merasa bangga jika pemimpin yang akan memimpin suatu daerah adalah orang yang satu daerah dan diharapkan bisa mewakili aspirasinya.

3. *Ketiga,* karena pemimpin yang dipilih adalah putra daerah, pertimbangan pilihan ini juga sangat logis dan cenderung menjadi trend karena putra daerah diasumsikan orang yang banyak tahu persoalan daerah yang akan dipimpin.

4. *Keempat,* karena berpengalaman memimpin, pengalaman memimpin sangat terkait dengan kecakapan bagimana mempimpin suatu daerah sehingga percepatan-percepatan pembangunan suatu daerah bisa dioptimalkan. Faktor ini juga kadang menjadi kunci keberhasilan seorang calon karena kepemimpinannya sudah dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah menjatuhkan pilihannya.

5. *Kelima,* karena tingkat pendidikan calon, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat pendidikan adalah salah satu cermin kecerdasan seseorang. Di dalam memimpin suatu daerah dibutuhkan kecerdasan dalam mengelola kemajemukan di masyarakat.

6. *Keenam,* karena tingkat ekonomi calon, di sebagian masyarakat tingkat ekonomi calon dianggap bahwa calon dengan tingkat ekonomi yang tinggi akan mengurangi resiko calon terjebak dalam tindakan koruptif.[55]

[55] Ibid 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pelaksanaan Pilwali Kota Surabaya Tahun 2015, Tingkat partisipasi pemilih pemula masih cukup rendah. Meskipun demikian sebenarnya KPU telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk menarik minat partisipasi pemilih pemula, namun rendahnya partispasi pemilih pemula bukan tanggung jawab KPU semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah dan peserta pemilu itu sendiri. Banyak strategi yang dilakukan oleh pihak KPU dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula dalam melakukan pemilihan kepala daerah di daerahnya. Seperti yang di sampaikan olek ketua KPU Surabaya pada saat di wawancarai, beliau mengatakan :

> "selain kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMA, atau lebih tepatnya anggota OSIS, mengapa yang diambil anggota OSISnya, karena jika menghadirkan seluruh siswa belum tentu mereka menerima semuanya selain itu jumlah SMA yang begitu banyak jadi tidak bisa melibatkan semuanya. Dengaan harapan dari anggota atau pengurus OSIS ini karena mereka adalah tokoh di sekolah-sekolahnya yang mana setelah sosialisai dari KPU ada sosialisasi teman sebaya yang itu tidak bisa dilakukan KPU".[56]

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih di Pilwali 2015 Kota Surabaya

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga

[56] Wawancara ketua KPU Surabaya Pada Tanggal 21 Nopember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemilih pemula yang baru mamasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti pun berusaha menggali informasi dari beberapa responden dan informan tentang faktor penghambat maupun pendorong partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilwali Kota Surabaya 2015.

a. Faktor Penghambat

1) Kesibukan Kegiatan Sehari-hari

Kegiatan sehari-hari para pemilih pemula di Kota Surabaya umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan pekerja, hal yang sangat wajar bagi para pemilih pemula yang rata-rata umurnya berkisar 17-21 Tahun itu. Hal inilah yang menjadikan para pemilih pemula enggan melakukan kegiatan politik yang umumnya menyita waktu yang banyak. Tuntutan sebagai pelajar dan bekerja menjadi alasan utama bagi para pemilih pemula Kota Surabaya enggan melakukan kegiatannya di bidang politik. Kenyataan ini sebenarnya dapat disiasati dengan cara pembagain waktu antara bersekolah dan bekerja dengan melakukan kegiatan politik di masyarakat. Bukan merupakan hal yang tabu jika seorang pelajar atau pekerja ikut dalam kegiatan politik di dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Perasaan Tidak Mampu**

Perasaan minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi yang rendah. Menurut Mohtar Mas'oed di samping pendidikan dan sosial ekonomi perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang bersetatus rendah.[57]

Keikutsertaan pemilih pemula dalam dunia politik, bagi beberapa pemula adalah suatu hal yang istimewa. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun di dalamnya adalah orang-orang berpendidikan, ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik tahan air.

b. **Faktor Pendorong**

1) **Rasa Ingin Tahu**

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang belum mempunyai pengalaman dalam pesta demokrasi. Dan kesemarakan pemilu di negri ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kelompok pemilih pemula.

[57] Mochtar Mas'oed.. *Perbandingan Sistem Politik*.. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008). Hal.61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengalaman yang sangat minim dalam pesta demokrasi yang mulai berkembang di negri ini menjadikan kelompok pemilih pemula ingin ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilu.

Hal itu juga dirasakan oleh para pemilih pemula di Kota Surabaya, dalam wawancara peneliti pada tanggal 25 November 2018 dengan responden yang bernama Achmad Hari Pitriono yang saat Pilwali Surabaya berlangsung dirinya baru berusia 17 tahun. Menyatakan bahwa dirinya baru pertama kali ini melakukan kegiatan penyontrengan sehingga dia tidak akan melewatkan untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya untuk memilih wakil rakyat sekaligus merasakan pengalaman yang baru pertama kali mereka alami.[58]

2) Kesadaran politik Para Pemilih

Kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam Pilwali Kota Surabaya 2015 cukup banyak. Mereka menganggap bahwa peran serta mereka untuk mensukseskan pilwali harus mereka lakukan karena mereka juga adalah bagian dari warga Negara Indonesia.

"Angapan pemilih pemula di Kota Surabaya bahwa orang yang sudah cukup umur dan sudah terdaftar dan diberi undangan untuk datang ke TPS adalah suatu keharusan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Hilman Hazmi (21 tahun) pada tanggal 15 Desember 2015 "Saya datang ke TPS mas, untuk ikut memberikan

[58] Wawancara dengan Achmad Hari Pitriono salah satu pemuda Surabaya yang menjadi pemilih pemula di tahun 2015 lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara kan warga negara yang sudah cukup umur harus datang dan memberikan suaranya"[59]

D. Pilwali Surabaya 2015 dan Peran KPU Kota Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula

Mendorong partisipasi pemilih pemula sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Karena bagaimanapun pemilih pemula memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana pemilih pemula sebagai bagian yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Meskipun dari segi kuantitas, jumlah mereka tak terlalu banyak. Tetapi mereka adalah generasi penerus bangsa yang tidak boleh bersikap apatis maupun apolitis.

Lembaga penyelenggara pemilu Kota Surabaya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menarik minat partisipasi politik pemilih pemula Kota Surabaya, agar pemilih pemula mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut. KPUD Surabaya menunjukkan betapa pentingnya sebuah institusi politik dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi di aras local seperti Surabaya. Dalam pendekatan institusi baru, memandang institusi sebuah negara mempunyai peran penting dalam berjalan roda politik di sebuah negara. Apa yang dilakukan KPU Kota Surabaya saat ini menunjukkan betapa pentingnya peran sebuah institusi dalam berjalannya pesta demokrasi di ranah local

[59] Wawancara dengan Hilman Hazmi salah satu pemuda Surabaya yang menjadi pemilih pemula di tahun 2015 lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Surabaya. KPU Kota Surabaya institusi ujung tombak demi lancarnya pesta demokrasi sekaligus kontestasi politik di Surabaya.

Jika dilihat dari segi efektivitas KPU Kota Surabaya telah melakukan peran yang diembannya sebagaimana mestinya. Jika dilihat dari keberhasilan program KPU telah sukses menjalankan pesta demokrasi di Surabaya dengan lancer, serta terlibatnya kaum milenial pemilih pemula dalam menyalurkan hak suaranya.

E. **KPUD Surabaya dan Strategi Melakukan Sosialisasi Ke Sekolah dan Kampus-Kampus untuk Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula di Pilwali Surabaya 2015**.

Peran KPU Kota Surabaya dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada pemilih pemula bertujuan untuk menarik minat partisipasi pemilih pemula agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak pemilih pemula yang memilih golput. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi melemahkan pemilu sebagai ajang penjaringan aspirasi pemilih pemula. Mereka yang golput tentu tidak diketahui bagaimana aspirasi mereka.

Tujuan dari sosialisai politik tidak telepas dari proses penyadaran pemilih pemula dan Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik. sebagaimana yang diungkap oleh Joko J. Prihatmoko tujuan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga. [60]

Sedangkan menurut Arbi Sanit, partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pemilu menjadi instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan organisasi yaitu negara Indonesia, baik di dalam lembaga legislative ataupun lembaga eksekutif. [61]

Untuk melaksanakan sosialisasi pilwali, KPU Kota Surabaya berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum sebagai Komisi Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus melaksanakan pemilihan umum

[60] Prihatmoko, J. Joko,. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. (Semarang: LP2I Press. 2003). Hal. 180.
[61] Arbi Sanit.. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. cetakan pertama.. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). Hal.7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum.[62]

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilukada sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan pemilukada dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik.

Jadi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula pada pilwali 2015 yaitu:

1) Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mendatangi sebagian sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu, gambaran pemilu, tata cara memilih, agar mereka mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu.[63] Hal serupa juga diungkapkan Sulinda Diyah selaku pemilih pemula di pilwali Surabaya 2015 yang pada saat itu berstatus siswi SMKN 3 Surabaya. Dan saat ini berstatus sebagai mahasiswi Untag Surabaya.[64]

   "Saat itu KPUD Surabaya mendatangi sekolah kami dalam rangka seminar untuk mensosialisasikan tentang pilwali Surabaya. Intinya

[62] Wawancara dengan Nur Syamsi Ketua KPUD Surabaya, 21 November 2018
[63] http://surabaya.tribunnews.com/2015/06/11/kpu-kota-surabaya-jaring-pemilih-pemula diakses 27 Januari 2018
[64] Wawancara dengan Sulinda Diyah salah satu pemilih pemula di Pilwali Surabaya 2015 3 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pemilu, dan tentu KPU mengajak untuk turut berpartisipasi menggunakan hak pilih pada saat pilwali Surabaya berlangsung.

2) Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya melakukan sosialisasi ke beberapa komunitas karang taruna di Kota Surabaya. sosialisasi tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengajak berpartisipasi di pemilukada 2015. Yang paling penting dalam sosialisasi ini yaitu tentu mengajak mereka untuk ikut memilih. [65]

3) Sosialisasi Melalui Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media sosial, pemilih pemula akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak calon-calon kepala daerah dan wakilnya. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya melakukam sosialisasi melalui media sosial baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan. seperti contoh melalui facebook KPU Kota Surabaya [66], karena kebanyakan generasi muda atau pemilih pemula menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi oleh karena itu KPU Surabaya menggunakan

[65] https://d-onenews.com/kpu-surabaya-gencar-gelar-sosialisasi-pilwali/ diakses 27 Januari 2018

[66] https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/KPU-Kota-Surabaya-519329008223202/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media sosial agar pemilih pemula atau generasi muda memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, sehingga dapat mengunggah partisipasi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya.

Sebagaimana diungkapakan oleh Komisioner KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, mengungkapakan sejauh ini media sosial berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi pemilih pemula dan melalui media sosial KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilih pemula dapat melihat rekam jejak calon-calon di pemilu pada saat itu. Dengan demikian, pemilih pemula memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka.[67]

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin hal ini terlihat dari upaya sosialisasi yang dilakukan, yaitu seperti yang telah disebutkan diatas. Walaupun KPU Kota Surabaya sudah melakukan upaya semaksimal mungkin namun upaya tersebut belum mampu menekan angka golput atau non partisipasi pemilih pemula di Kota Surabaya. Hal ini telah terbukti pada saat pilwali Surabaya 2015 lalu Angka golput justru trennya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

[67] Wawancara dengan Nur Syamsi Ketua KPUD Surabaya, 21 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi pemilihan umum Kota Surabaya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat Kota Surabaya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menarik minat partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih dan pendidikan elektoral.

Pendidikan pemilih yang dimaksud disini yaitu memperkenalkan tata cara pencoblosan dan Peran pemilih pemula dalam Pemilu, memberikan Pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi pemilih pemula, dan Meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu yang berkualitas. Pendidikan elektoral yang dimaksud disini yaitu kegiatan yang bertujuan memberi pemahaman kepada pemilih pemula mengenai fungsi pemilihan dalam suatu sistem negara demokrasi. sehingga Pemilih Pemula tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya.

Kegiatan semacam ini bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai panitia penyelenggara pemilu, namun bisa juga dilaksanakan oleh semua elemen bangsa ini, karena pemilu itu yang menentukan nasib bangsa, dalam menentukan wakil rakyat diparlemen dan pemimpin bangsa baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pemilih pemula bagaimana tata cara dan peran pemilih pemula dalam pemilu dengan demikian pemilih pemula akan mengerti peran mereka dalam pesta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua KPU Surabaya Bapak Nur Syamsi[68].

> "Pesan yang kami sampaikan intinya untuk mengajak Pemilih Pemula untuk ikut berpartisipasi demi kemajuan Surabaya dan Alhamdulillah Pemilih Pemula cukup antusias dalam melaksanakan pilwali 2015 kemarin, partisipasi pemilu juga cukup tinggi, dan hasilnya kita mendapatkan Wali Kota terpilih" (Wawancara ketua KPU Surabaya Pada Tanggal 21 Nopember 2018)

Memperkuat komunikasi dan keterbukaan Informasi KPU kepada publik merupakan salah satu strategi KPU yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat, sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat atau generasi milenial baik mengenai teknis penyelenggaraan maupun data dapat mudah diakses oleh masyarakat maupun pemilih pemula, diharapkan outputnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pilwali Surabaya tahun 2015.

Selain memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada pemilih pemula dan pendidikan pemilu, KPU juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik.

KPU Kota Surabaya berusaha menarik minat pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula

[68] Wawancara ketua KPU Surabaya Pada Tanggal 21 Nopember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat penting sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya. Pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum Kota Surabaya berupaya bagaimana caranya supaya pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu terutama menjelang pemilihan wali kota 2015. Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah mengambang dalam Pemilu.

Agar sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.

Upaya yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu Kota Surabaya dalam menarik minat pemilih pemula yang notabene masih muda maka upaya yang digunakanpun harus tidak jauh dari aktifitas positif anak muda. Seperti, lembaga pemilihan umum Kota Surabaya berusaha menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum atau mengadakan pertemuan komunitas pemuda. Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena sebagai pengalaman pertama bagi mereka.

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik. Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya ataupun pemilu Kepala Daerah di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarkan pemilu dengan lebih baik.

Mengenai betapa pentingnya peran KPUD Surabaya dalam menarik minat partisipasi politik pemilih pemula diakui sendiri oleh pemilih pemula pada saat itu salah satunya Ahmad Zaenuri selaku siswa SMAN 5 Surabaya saat itu. Dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

> "Jujur mas secara pribadi saya mengetahui tentang pemilu dan pemilukada itu karena pada saat menjelang Pilwali Surabaya 2015 mengunjungi sekolah saya untuk sosialisasi tentang pilwali Surabaya 2015. Pada saat itu perwakilan dari KPUD Surabaya menjelaskan banyak hal tentang kepemiluan dan pemilukada, dan pentingnya menghindari golput." [69]

Hal senada juga diungkapkan Adam Muhammad selaku pemilih pemula di pilwali Surabaya 2015 yang pada saat itu berstatus siswa

[69] Wawancara dengan Ahmad Zaenuri salah satu pemilih pemula di Pilwali Surabaya 2015 25 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SMKN 2 Surabaya. Dan saat berstatus sebagai mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya.

> "Saat itu perwakilan KPUD Surabaya datang ke sekolah saya untuk mensosialisasikan tentang pilwali Surabaya. Intinya tentang serba-serbi pemilu, dan pentingnya menggunakan hak pilih pada saat pilwali Surabaya berlangsung."[70]

Sebagai negara demokrasi memang sudah seharusnya kesadaran pemilih pemula dalam pemilu terus meningkat dan angka golput seharusnya terus menurun. tentunya semua ini tidak terlepas dan bergantung kepada kinerja KPU dan yang paling utama kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi setiap pemilu berlangsung. Angka pemilih yang terus meningkat dan dibarengi angka golput yang terus pula meningkat dan ini menandakan perhelatan demokrasi di indonesia khususnya di Kota Surabaya masih perlu mendapat perhatian cukup serius. Karna mengingat masa depan bangsa dan negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka apabila pemilih pemula tidak menyalurkan suaranya pada saat pemilihan umum itu berarti pemilih pemula tidak peduli lagi terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

F. KPUD Surabaya dan Efektivitas Peran dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula

Efektivitas sebagaimana menurut Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen merupakan hubungan antara keluaran suatu

[70] Wawancara dengan Adam Muhammad salah satu pemilih pemula di Pilwali Surabaya 2015 26 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut".[71]

Gibson memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :[72]

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan Terhadap Program
4. Tingkat Input dan Output
5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokonya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.[73]

---

[71]Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000),29
[72]Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989),129
[73]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks KPUD Surabaya mereka telah menjalankan perannya secara efektif dalam menarik minat partisipasi politik pemilih pemula pada Pilwali Surabaya 2015. Dari sisi keberhasilan program KPUD Surabaya sukses menjalankan Pilwali Surabaya 2015 dengan lancer dan sebagaimana yang diharapkan walaupun ada sedikit kendala terkait keterbatasan SDM KPU Surabaya. Seperti yang di sampaikan salah satu staf KPU Surabaya Ibu Iswati bagian data dan informasi publik.

> "kendalanya yang pertama, karena masyarakat atau pemilih pemula melihat bahwa pemilih itu masih merupakan hal bukan kewajiban, sehingga ada segelintir masyarakat atau pemilih pemula berpikir, "ah, itukan hak dia untuk memilih atau tidak", selain itu dari sisi wilayah kota surabaya cukup luas dan terbatasnya sumber daya manusia yang kita miliki sehingga kita membutuhkan kerja yang ekstra untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang ada di Kota Surabaya" (Hasil Wawancara Pada Tanggal 2 April 2019)

Faktor penghambat yang terdapat di KPU Kota Surabaya bisa dilihat dari hasil wawancara, bahwa sumber daya manusia memang penting untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang terisolir untuk memberikan pelayanan dan memberikan informasi di Kota Surabaya.

Sedangkan dari segi keberhasilan sasaran KPUD Surabaya sukses menarik partisipasi pemilih pemula pada pilwali 2015, namun dalam konteks ini partisipasi politik yang berusaha ditingkatkan oleh KPUD Surabaya pada kaum milenial adalah dengan memberikan pemahaman secara langsung dengan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dan memberikan informasi melalui media sosial tentang pentingnya berpartisipasi dalam pilwali dengan menyalurkan hak pilihnya.

G. KPUD Surabaya dan Pentingnya Peran Institusi

Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis. Pendeketan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama, bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya, dan bagaimana institusi itu berinteraksi.

Dalam konteks ini KPUD Surabaya telah menjalankan tugasnya sebagai sebuah institusi dalam menjalankan lancarnya proses demokratisasi di ranah local di Surabaya. Dalam pendekatan institusi baru, lembaga sebuah negara mempunyai peran yang teramat penting dalam berjalannya roda politik. Hasil akhir dari sebuah proses politik bukan hanya ditentukan oleh perilaku politik para actor, melainkan juga ditentukan oleh institusi negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KPU Kota Surabaya sebuah institusi yang berperan penting dalam berjalannya penyelenggaraan pesta demokrasi di Surabaya, telah menjalankan perannya sebagaimana mestinya. KPU Kota Surabaya telah membuktikan bahwa institusi politik mempunyai peran penting dalam berjalannya roda politik di sebuah negara. Jika dilihat dari segi efektifitas KPU Kota Surabaya telah menjalankan perannya dengan begitu efektif dalam menarik minat generasi muda pemilih pemula agar turut aktif untuk berpartisipasi politik menyalurkan hak pilihnya di Pilwali Surabaya 2015.

   Terbukti dari dari beberapa narasumber pemilih pemula yang penulis wawancarai mereka mengaku bertambah wawasannya tentang pemilu karena sosialisasi dari KPUD Surabaya. Peran KPU Kota Surabaya dalam melakukan sosialisasi ke berbagai tempat agar pemilih pemula bersedia menyalurkan hak suaranya di pilwali Surabaya 2015, turut andil dalam menarik minat pemilih pemula untuk memberikan suaranya.

2. Faktor Penghambat partisipasi politik pemilih pemula dalam Pilwali Surabaya tahun 2015 adalah kesibukan sehari-hari, perasaan tidak mampu, sedangkan faktor pendorong partisipasi pemilih pemula dalam Pilwali Surabaya 2015 adalah *pertama* rasa ingin tahu pemilih pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik pemilihan kepala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah, kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang kepala daerah. Dari sinilah rasa ingin tahu pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung. *Kedua* kesadaran politik para pemilih pemula. Hal ini dikarenakan para pemilih pemula di kota Surabaya mempunyai keinginan untuk mensukseskan pilwali yang diselenggarakan untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

B. Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukan kemampuannya dalam dunia politik, serta menjauhkan dirinya dari perasaan tidak mampu atau minder.
2. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung kegiatan pemilih pemula dalam dunia politik, karena ini adalah tanggung jawab bersama antara KPU dan pemerintah, serta pemberian pendidikan politik yang dikususkan kepada pemilih pemula yang mana kedepannya para pemilih pemula ini mau menyalurkan hak politiknya dan turut berpartisipasi.
3. Melalui penelitian ini semoga dapat menjadi data dan khazanah baru bagi kajian demokratisasi di Indonesia terutama di ranah lokal. Serta dapat menjadi bahan penelitian lanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Boengin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga

Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia:Teori Konsep dan Isu Strategi*. Jakarta, Rajawali Pers

Mas'oed. Mochtar. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Prihatmoko, J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I Press

Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. cetakan pertama.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramalan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grasindo

Soekanto, Soerjono. 1989. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*. Bandung: Nusa Media

Rahma Dani, Wahyu. 2010. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 01 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_15.pdf (Diakses pada 12 oktober 2018).

Melani, Indar. 2013. *Perilaku Politik Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua dalam Pemilukada Kabupaten Pinrang 2013*. Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hassanudin Makassar

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/22279 diakses 1 Oktober 2017

http://www.viva.co.id/berita/nasional/156229-risma-bambang-pemenang-pilkada-surabaya diakses 1 Oktober 2017

KPU.go.id diakses 2 Desember 2017

http://www.suarasurabaya.net/fokus/654/2015/159631-Data-dan-Angka-Pilwali-Surabaya-tahun-2005-dan-2010 diakses 1 Oktober 2017

http://www.viva.co.id/berita/nasional/156229-risma-bambang-pemenang-pilkada-surabaya diakses 1 Oktober 2017

Wawancara dengan Nur Syamsi Ketua KPUD Surabaya, 21 November 2018

Wawancara dengan Achmad Hari Pitriono salah satu pemuda Surabaya yang menjadi pemilih pemula di tahun 2015 lalu, 2 Desember 2018

Wawancara dengan Hilman Hazmi salah satu pemuda Surabaya yang menjadi pemilih pemula di tahun 2015 lalu, 2 Desember 2018

Wawancara dengan Ahmad Zaenuri salah satu pemuda Surabaya yang menjadi pemilih pemula di tahun 2015 lalu, 25 Januari 2018

Wawancara dengan Adam Muhammad salah satu pemuda Surabaya yang menjadi pemilih pemula di tahun 2015 lalu, 26 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id